

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam menulis karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Antara GAM Dengan Pemerintah Indonesia (2005-2012)*. Dalam menulis skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah atau historis dengan menggunakan studi literatur sebagai teknik penelitiannya. Metode penelitian sejarah menurut Sjamsuddin (2012) terdiri dari heuristik, kritik, dan historiografi.

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian sejarah sering disebut juga dengan metode sejarah. Metode dapat dibedakan dengan metodologi di mana metodologi merupakan "*science of methods*". Menurut Sartono Kartodirdjo (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 14) metode dan metodologi merupakan fase yang berbeda untuk tugas yang sama. Metode merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan, sementara metodologi merupakan cara bagaimana harus mengetahui.

Selain itu, menurut Florence M.A Hilbish (dalam Abdurahman, 2007, hlm. 53) yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah ialah suatu penyelidikan untuk menemukan fakta-fakta yang berguna untuk menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, ataupun untuk memperkuat atau menolak suatu teori. Pengertian lain yang disampaikan oleh Gilbert J Garraghan (dalam Abdurahman, 2007, hlm. 53) mengemukakan mengenai metode penelitian sejarah ialah seperangkat pedoman atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, memverifikasi dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Dengan demikian metode penelitian sejarah merupakan prinsip dalam melakukan penelitian sejarah. Metode penelitian juga merupakan langkah operasional dari suatu penelitian. Adapun metode penelitian sejarah meliputi.

##### **3.1.1 Heuristik**

Heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah yaitu mengumpulkan data. Menurut Helius

Eka Auliana Pratiwi, 2019

*CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sjamsuddin (2012, hlm. 86), kegiatan heuristik ini merupakan kegiatan yang banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Oleh sebab itu kita perlu mengatur strategi agar dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam memperoleh sumber sejarah.

Menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 89), ada enam tahapan yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu sebagai berikut.

- a. Memilih topik yang sesuai,
- b. Menelusuri semua bukti yang relevan,
- c. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung,
- d. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan,
- e. Menyusun hasil-hasil penelitian ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya,
- f. Menyajikan hasil penelitian dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

Sumber primer merupakan unsur yang penting dalam mencari data penelitian. Sumber primer ialah sumber yang didapat dari seorang saksi mata. Bentuk – bentuk dari sumber primer diantaranya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan pemerintah atau organisasi massa, bentuk lainnya yang merupakan sumber primer ialah wawancara langsung dengan pelaku peristiwa sejarah atau saksi mata sejarah. Sementara sumber lainnya seperti berita dalam majalah, surat kabar, merupakan sumber non primer sebab tidak disampaikan oleh saksi mata (Abdurahman, 2007, hlm. 65).

### 3.1.2 Kritik

Tahapan pengumpulan sumber atau heuristik tentunya sudah membuahkan hasil berupa data-data dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian, tidak hanya sebatas mendapatkan data, tetapi di dalam penelitian sejarah masih ada tahapan selanjutnya yaitu Kritik Sumber untuk memeriksa kebenaran sumber sejarah. Kritik Sumber agar karya sejarah merupakan karya ilmiah yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi, manipulasi

atau fabrikasi sejarawan (Sjamsuddin, 2012, hlm. 132). Keabsahan atau kritik sumber ini meliputi kritik eksternal dan kritik internal.

### **3.1.2.1 Kritik Eksternal**

Pengujian untuk mengetahui keaslian suatu sumber dan melakukan verifikasi terhadap aspek luaran sumber sejarah disebut sebagai tahapan kritik eksternal. Aspek luaran yang diteliti berupa kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, huruf dan tampilan lainnya dari suatu dokumen (Abdurahman, 2007, hlm. 68). Pemahaman lebih jauh mengenai kritik eksternal menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 134) yaitu kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber untuk memastikan apakah dalam waktu tertentu terdapat perubahan dari awal mulanya keberadaan sumber oleh orang tertentu atau justru tidak ada perubahan sama sekali.

### **3.1.2.2 Kritik Internal**

Kritik internal merupakan penentuan kredibilitas sumber, kredibilitas sumber bertujuan untuk mengurangi kekeliruan dalam penulisan sejarah selanjutnya. Kritik internal dapat dilakukan dengan cara memeriksa sumber yang *shahih* yaitu dengan cara mengamati mana sumber yang independen dan mana sumber yang dependen. Sumber yang dependen dapat diragukan kebenarannya sebab kemungkinan terjadi ketergantungan terhadap sumber asli. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan sumber-sumber yang telah terkumpul sebelumnya (Sjamsuddin, 2012, hlm. 152).

### **3.1.3 Historiografi**

Historiografi merupakan tahap lanjutan setelah melakukan kritik sumber, dalam tahapan ini peneliti selain menuangkan hasil penelitiannya juga melakukan interpretasi sejarah, eksplanasi sejarah, dan presentasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan (Sjamsuddin, 2012, hlm. 156). Interpretasi yaitu analisis atau sintesis sejarah berdasarkan sumber yang ditemukannya dan tentunya sesuai dengan fokus kajian penelitian peneliti. Menurut Tosh (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 158) terdapat dua motivasi sejarawan dalam menulis sejarah, yang pertama dorongan yang menuntut deskripsi dan narasi, kedua

dorongan yang menuntut analisis. Metode interpretasi sejarah pada umumnya diarahkan pada pandangan filsafat.

Selain melakukan interpretasi, sejarawan juga melakukan eksplanasi sejarah atau penjelasan sejarah. Penjelasan sejarah yang dilakukan oleh para sejarawan untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Namun juga bagi sejarawan lainnya sejarah juga harus dapat menjawab pertanyaan mengapa agar dapat menjawab pertanyaan yang paling tinggi (Sjamsuddin, 2012, hlm. 191). Ekplanasi sejarah memiliki beberapa model diantaranya terdapat model kausalitas, *covering law model*, hermeuneutika, analogi, dan model motivasi.

Berikutnya dalam historiografi ialah penyajian atau ekspose atau dalam Bahasa Jerman disebut *Darstellung*. Pada tahap ini, sejarawan atau peneliti memaparkan, menyajikan, atau melaporkan hasil penelitiannya. Dalam buku *Metodologi Sejarah* yang ditulis oleh Helius Sjamsuddin (2012, hml. 236), bahwa ada dua dorongan yang menggerakkan sejarawan menulis yaitu keinginan untuk mencipta ulang, dan yang kedua menafsirkan dan menjelaskan. Adapun tiga bentuk teknik dasar dalam menulis atau memaparkan sejarah ialah deskriptif-naratif, analitis-kritis, dan gabungan diantara keduanya yaitu deskriptif-naratif dan analitis-kritis. *Point* penting dari penulisan sejarah dengan penulisan karya ilmiah lainnya ialah penekanannya di mana penulisan karya ilmiah sejarah akan selalu memperhatikan pada aspek kronologis (Abdurahman, 2007, hlm. 77).

### 3.2 Persiapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah mempersiapkan berbagai keperluan penelitian. Hal yang dipersiapkan peneliti untuk memulai penelitian ialah menentukan tema peneliti kemudian membaca dan mencari beberapa literatur yang terkait dengan tema yang dipilih agar mendapat gambaran dari penelitian-penelitian sebelumnya baik dari aspek fokus penelitian maupun memperoleh gambaran sumber-sumber yang dapat kumpulan oleh peneliti untuk mendukung proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun rangkaian persiapan penelitian yang dilakukan peneliti ialah menentukan dan mengajukan tema penelitian, menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan, serta melakukan proses bimbingan.

Eka Auliana Pratiwi, 2019

**CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 3.2.1 Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian

Menurut Sejarawan Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Sejarah* (2005, hlm. 91) menyatakan bahwa sebaiknya penentuan topik penelitian itu didasarkan kepada dua hal yaitu karena kedekatan emosional, dan kedekatan intelektual. Sementara penentuan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti berawal dari ketertarikan peneliti ketika membaca buku tentang sejarah perjuangan Aceh yang berjudul *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945-1949* yang ditulis oleh TGK. A. K Jakobi tahun 2009. Dari buku tersebut penulis mendapatkan banyak informasi mengenai perjuangan rakyat Aceh dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan yang dilakukan dirasa kurang dihargai dan banyak janji yang diberikan pemerintah Indonesia kepada rakyat Aceh sebagai pemanis saja, hal inilah kemudian menyebabkan perbedaan pemahaman sehingga muncullah pemicu-pemicu konflik antara kedua belah pihak. Konflik yang terjadi cukup lama, selama kurang lebih 30 tahun dan hal ini dianggap juga sebagai ketidak mampuan dari pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan internalnya, bantuan dari pihak luar pun kemudian dirasa diperlukan untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik internal Indonesia tersebut.

Pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Aceh dirasa dibutuhkan untuk melakukan proses damai dengan cara yang lebih terhormat. Pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa pendekatan kemiliteran tidak lagi efektif untuk meredam kekuatan GAM. Selanjutnya pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan dialogal dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penengah agar adanya transparansi dalam proses perdamaian di Aceh. Perubahan penanganan konflik Aceh tidak terlepas dari pergantian rezim yang berkuasa di Indonesia, dimulai dari BJ Habibie menjabat sebagai presiden Indonesia penyelesaian Konflik Aceh sudah menggunakan pendekatan dialogal. Namun, ketika Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden, DOM kembali diberlakukan kembali. Pemberlakuan DOM atas provinsi Aceh pada tahun 2003 menjadi salah satu kegagalan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Aceh, pasalnya kekerasan kembali terjadi. Musibah gempa bumi dan Tsunami pada 26 Desember 2004 dan ditetapkan sebagai bencana nasional, akibatnya banyak

berdatangan bantuan-bantuan dari seluruh Indonesia dan juga dunia internasional.

NGO Internasional juga tidak luput untuk memberikan bantuan kepada rakyat Aceh, namun dalam pendistribusian bantuan tersebut mengalami kendala perihal daerah bencana merupakan daerah konflik. Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan antara GAM dan Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut. Penyelesaian konflik Aceh kemudian diselesaikan dengan cara yang lebih bermartabat tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini merupakan pertimbangan yang matang dari wakil presiden Indonesia, Jusuf Kalla. Rakyat Aceh yang menderita pasca musibah tersebut tidak dapat ditelantarkan akibat ulah sebagian pihak yang justru merugikan seluruh masyarakat Aceh. Maka dari itu, Jusuf Kalla melakukan pendekatan kepada petinggi-petinggi GAM. Dimulai lah kembali upaya penyelesaian konflik Aceh melalui pendekatan dialogal, upaya yang ditempuh adalah dengan menghadirkan pihak ketiga yang akan berperan sebagai mediator.

Dinamika penyelesaian konflik Aceh merupakan salah satu hal menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Terdapat 2 organisasi non-pemerintahan yang pernah turut andil dalam konflik Aceh, yaitu *Henry Dunant Centre* dan *Crisis Management Initiative* yang dianggap berhasil dalam menyelesaikan konflik Aceh. Hal ini kemudian menjadi ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian, mengapa CMI dapat dikatakan berhasil sedangkan HDC tidak, padahal keduanya merupakan mediator dalam dialog damai konflik Aceh.

Selanjutnya setelah peneliti menentukan tema penelitian dan banyak mencari *literature* terkait dengan tema penelitian, kemudian peneliti mengajukan proposal penelitian karya ilmiah berupa skripsi di Seminar Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah pada tanggal 1 Februari 2018. Saat peneliti mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul *Peranan Crisis Managemet Initiative dalam Penyelesaian Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia 2005-2015* peneliti mendapat saran dari calon dosen pembimbing yang ditunjuk oleh TPPS Departemen Pendidikan Sejarah yaitu Bapak Dr. H. Didin Saripudin, Ph.D, M.Si dan Bapak Drs.

Ayi Budi Santosa, M.Si untuk menghapus kata “peranan” dan selanjutnya mengkrucutkan tahun penelitian dari 2005-2012.

### 3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian

Penyusunan rancangan penelitian dilakukan sejak peneliti mengontrak mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah. Saat peneliti mengontrak mata kuliah tersebut, peneliti mendapat banyak saran dari dosen pengampu mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah. Adapun saran yang diajukan ialah peneliti harus menambah sumber-sumber dari penelitian pendahulu berupa biografi tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian konflik di Aceh, dimulai dari tokoh pencetus gerakan, penemu ideologi pergerakan, dan Presiden yang menjabat pada periode 2004-2009.

Setelah peneliti mengajukan proposal yang berjudul *Peranan Crisis Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia 2005-2015* pada tanggal 22 Oktober 2017. Pada tanggal 1 Februari 2018 peneliti melakukan seminar proposal dan mendapat masukan dari calon dosen pembimbing untuk merubah sedikit judul penelitian menjadi *Crisis Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia 2005-2012*.

Judul baru tersebut kemudian disetujui oleh calon dosen pembimbing, dan segera peneliti mengurus pembuatan SK untuk dosen pembimbing kepada TPPS Departemen Pendidikan Sejarah. Maka turunlah Surat Keputusan dari Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Nomor: 226/TPPS/DPS/PEM/2018 yang ditandatangani oleh Ibu Dr. Murdiah Winarti, M.Hum selaku Ketua Departemen Pendidikan Sejarah dan Ibu Dra. Yani Kusmarni, M.Pd selaku Ketua TPPS Departemen Pendidikan Sejarah yang menyatakan bahwa peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dibimbing oleh Bapak Prof. H. Didin Saripudin, Ph.D, M.Si selaku dosen pembimbing I, dan Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si selaku dosen pembimbing II.

### 3.2.3 Proses Bimbingan

Proses bimbingan dilakukan agar peneliti dapat menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan baik dan lebih terarah ketika menghadapi kesulitan dalam melakukan penelitian. Adapun proses bimbingan yang

pertama dengan Dosen Pembimbing I dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018. Pada saat bimbingan tersebut peneliti melaporkan *draft* Bab I dan Bab II, peneliti disarankan agar menghilangkan nomor dalam penulisan tujuan umum penelitian, memperjelas tujuan penelitian, menambah penelitian terdahulu berupa jurnal Internasional dan menambah referensi untuk menjelaskan mengenai teori konflik secara kompleks. Pembimbing I juga menyarankan untuk langsung membuat SK Pembimbing agar proses bimbingan berjalan lancar.

Proses bimbingan dengan pembimbing II dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2018, dalam proses bimbingan terdapat beberapa hal yang perlu ditambahkan, diantaranya adalah penambahan konsep *Crisis Management Initiative* dalam Kajian pustaka, efisiensi kalimat dalam 1 paragraf, menjelaskan alasan pengambilan rentang tahun penelitian di Latar Belakang.

Proses bimbingan dengan pembimbing II dilanjutkan pada 10 September 2018, terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan beberapa kata dan kurangnya penulisan sumber dalam mengutip, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Pembimbing II menginstruksikan untuk menyerahkan *draft* bab 3 untuk bimbingan selanjutnya.

Bimbingan selanjutnya dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2018. Bimbingan dilakukan dengan pembimbing I dan pembimbing II, hal-hal yang dikoreksi adalah di bagian bab 2 mengenai tujuan penelitian dan penyederhanaan rancangan penelitian di bab 3. Pembimbing I menginstruksikan untuk menambah referensi dalam menjelaskan teori dalam melakukan analisis dan untuk analisis teori sebaiknya dijelaskan dalam bab 4. Pembimbing II menginstruksikan untuk melakukan penyederhanaan dalam bab 3 mengenai rancangan penelitian, sebab sebagian besar sudah di bahas di latar belakang yang terdapat di dalam bab 1

Bimbingan dilakukan lagi pada tanggal 27 November dengan pembimbing II dan menyerahkan bab 1,2,3 dan 4. Namun, jumlah bab terlalu banyak dan bimbingan dilanjutkan pada esok harinya. Selanjutnya tanggal 28 November dilakukan kembali bimbingan dengan pembimbing II dan masih terdapat koreksi beberapa typo di dalam penulisan skripsi yang terdapat dalam bab 1,2 dan 3. Selain itu juga untuk menambahkan opsi koleksi pribadi untuk heuristik dalam bab 3.



### 3.3 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yang sesuai dengan metode penelitna sejarah. Adapun metode yang digunakan ialah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, dan historiografi.

#### 3.3.1 Heuristik

Heuristik merupakan tahap awal untuk memulai proses penelitian sejarah setelah sebelumnya peneliti menentukan tema ataupun judul penelitian. Adapun judul penelitian peneliti ialah *Crisis Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia 2005-2012*. Pada tahap ini peneliti telah berhasil mengumpulkan beberapa sumber yang terkait dengan judul skripsi peneliti dari beberapa instansi yang telah dikunjungi ataupun dihubungi oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut.

##### a. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia

1. Buku *Sistem Politik Indonesia* yang ditulis Oleh Syafie dan Azhari memberikan gambaran mengenai penerapan dari sistem politik di Indonesia dan menjelaskan secara umum dampak dari penerapannya, salah satu dampak negatif dari penerapan sistem politik di Indonesia adalah konflik seperti yang terjadi di Aceh.
2. Buku *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* dari M.C Rickleffs. Buku tersebut memberikan gambaran kepada peneliti mengenai konflik yang terjadi di Aceh dan Upaya penanganan dari pihak pemerintah Indonesia.
3. *Buku Teori Sosiologi Modern* tahun 2010 yang ditulis oleh Ritze dan Godman yang menjelaskan mengenai teori-teori dalam ilmu sosiologi, salah satunya adalah teori konflik yang berhubungan dengan analisis penelitian.
4. Skripsi yang berjudul *Resolusi Konflik Aceh : Kajian Ketidakberhasilan Henry Dunant Centre dalam Penyelesaian Konflik Pemerintah Indonesia dengan GAM 2000-2004* oleh Taupik seorang mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2010 dan ditulis pada tahun 2012. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai salah satu upaya penyelesaian konflik di Aceh melalui jalur damai yakni

- mediasi, namun upaya mediasi tersebut dapat dikatakan gagal disebabkan oleh beberapa faktor. Peneliti mendapatkan informasi lebih mengenai alternatif solusi dalam penanganan konflik melalui jalur musyawarah.
- b. Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tengah
    1. *Mediasi Konflik Aceh : Belajar dari Pengalaman HDC di Aceh* yang diterbitkan oleh Ar-Raniry Press oleh Muhammad Sahlan pada tahun 2013.
  - c. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
    1. *Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* oleh Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S pada tahun 2009.
    2. *Tentara dan Kaum Bersenjata* Oleh Y.B Mangunjaya tahun 1999.
    3. *Bisnis Militer Mencari Legitimasi* oleh Danang Widoyoko, Irfan Muktiono dkk pada tahun 2003.
  - d. Perpustakaan Masjid Baiturrahman Banda Aceh
    1. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas pada tahun 2009.
    2. *Dokter Zaini Abdullah Pejuang Rakyat Aceh* oleh Murizal Hamzah pada tahun 2009.
    3. *Buku Kisah Usai Perang* oleh Adi Warsidi pada tahun 2009.
    4. Jurnal Haba No.77/2012 Edisi Oktober-Desember 2012 dengan judul artikel : *Pasukan Inong Balee Dalam Sejarah Aceh* oleh Fatma Susanti, S.Pd.
  - e. Koleksi Pribadi
    1. Laporan dari Badan Reintegrasi Aceh yang terhimpun dalam *Meta Analysis Report 2008* ditulis pada tahun 2008.
    2. *Tamaddun dan Sejarah : Etnografi Kekerasan di Aceh* oleh Hasanuddin Yusuf Adnan pada tahun 2003.
  - f. Sumber Internet
    1. Tesis berjudul *Keberhasilan CMI dalam Mediasi Konflik di Aceh* yang ditulis oleh Henny Lusua pada tahun 2010 dari Universitas Indonesia. Henny merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti memperoleh

- tesis tersebut dengan cara mengakses internet dengan menggunakan fasilitas <http://www.lontar.ui.ac.id/>.
2. Artikel yang berjudul *Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki* oleh Muhammad Iqbal Vol. 7 - No. 2 / 2014-10.
  3. Artikel Jurnal yang berjudul *Pattern of Diplomacy* Vol. 30, No. 1 yang ditulis oleh Schegel.
  4. Artikel Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i dengan judul *Konflik dan Resolusi* Vol II No.1 Jun 2015 ISSN : 2356-1459-15 oleh Suhardono.
  5. Artikel dari jurnal internasional yang ditulis oleh Zulhilmi dan Ady Muzwardi yang termual dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan : *Aceh Conflict Resolution by The Government of Indonesia* Vol. 1 No. 1 April 2016.
  6. Artikel dari Jurnal Sosiologi dengan judul *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi* Vol 21 No. 1 hlm 81-108 yang ditulis oleh Suadi Zainal pada tahun 2016.
  7. Artikel dari Jurnal dengan judul *Internasionalisasi Kasus Pelanggaran HAM di Aceh Pada Era 1990-2004 Oleh Organisasi Internasional* yang ditulis oleh Rizky Dian Ayu tahun 2016.
- g. *Crisis Management Initiative*, Helsinki.
- Dengan mengirimkan surat elektronik ke kantor pusat *Crisis Management Initiative* di Helsinki. Pihak CMI kemudian membalas dengan mengirimkan e-book terkait laporan akhir dari penerapan hasil perundingan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun balasan dari pihak CMI adalah sebagai berikut :
1. *E-book* yang berjudul *Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh*, yaitu laporan akhir yang dibuat oleh *Crisis Management Initiative* dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan disunting oleh Stephen Thompson.
  2. *International review of Peace Initiatives : Learning from the Indonesia-Aceh peace process.*

### 3.3.2 Kritik

Eka Auliana Pratiwi, 2019

**CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan beberapa sumber, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik. Tujuan dari pada proses kritik atau verifikasi sumber ini ialah untuk menegakkan keaslian dan kredibilitas sumber. Selain itu kritik ini juga bertujuan agar penulisan sejarah yang ditulis ini sesuai dengan ketentuan ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

### 3.3.2.1 Kritik Eksternal

Aspek luaran dari sumber sejarah yang digunakan sebagai kumpulan informasi dalam penulisan karya ilmiah ini memerlukan identifikasi terhadap otentisitas dan integritas dari sumber yang digunakan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kritik eksternal yaitu untuk mengetahui asal usul sumber, suatu pengkajian dari catatan atau peninggalan sumber sejarah untuk mengetahui apakah sumber atau catatan sejarah tersebut telah berubah atau justru tetap (Sjamsuddin, 2012, hlm. 134).

Aspek yang perlu diperhatikan dalam kritik sumber adalah sumber kritik hanya dapat dilakukan pada sumber utama atau sumber primer. Sumber primer adalah bukti yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Selain itu, terdapat sumber pendukung lainnya yang disebut sebagai sumber non primer yang bertolak belakang dengan sumber primer yakni tidak ditulis dalam satu waktu dimana sebuah peristiwa terjadi dan merupakan hasil sintesa dari beberapa kesaksian atau sumber lainnya.

Sementara sumber yang diperoleh peneliti terdiri dari sumber primer dan sumber non primer. Adapun sumber primer yang berhasil diperoleh oleh peneliti diantaranya ialah *Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh* yang dibuat atas dukungan keuangan dari Uni Eropa yang bekerjasama dengan *Crisis Management Initiative*. Sumber tersebut dikirim langsung oleh kantor CMI di Helsinki dalam bentuk *e-book* melalui fasilitas surat elektronik. Apabila dilihat dari sumber penulisan yang langsung dibuat oleh CMI sebagai laporan pertanggung jawaban dalam proses tindak lanjut perdamaian di Aceh, maka sumber ini dapat dikatakan asli.

### 3.3.2.1 Kritik Internal

Tahapan selanjutnya dalam verifikasi atau kritik sumber adalah kritik internal. Kritik internal dapat dilakukan ketika peneliti sudah

mendapatkan bukti kebenaran dari sumber. Menurut Sjamsuddin (2007, hlm. 143) setelah *fakta kesaksian (fact of testimony)* ditegaskan melalui kritik eksternal, tiba giliran sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak. Sedangkan, menurut Priyadi (2012, hlm. 67) Kritik internal dilakukan dengan memperhatikan dua hal yakni Pertama penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber, kedua membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya).

Pengumpulan sumber dalam penelitian kali ini apabila merujuk pada pendapat Priyadi, maka peneliti lebih condong untuk memperhatikan point pertama, poin kedua lebih menekankan kepada pencarian sumber lisan sedangkan dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan kajian literatur saja. Kritik internal yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber yang berhasil dikumpulkan ialah diantaranya laporan akhir yang ditulis oleh *Crisis Management Initiative* yang berjudul *Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh dan International review of Peace Initiatives : Learning from the Indonesia-Aceh peace process*. Dari keterangan yang dilaporkan oleh *Crisis Management Initiative* terdapat kesamaan dengan laporan yang ditulis oleh Badan Reintegrasi Aceh dalam *Meta Analysis Report* pada tahun 2008. Kedua sumber ini memaparkan keadaan Aceh pasca pelaksanaan dari penerapan perjanjian Helsinki.

Tujuan dari penulisan laporan akhir yang dilakukan oleh CMI menurut peneliti adalah sebagai laporan pertanggung jawaban terhadap partisipasi mereka dalam upaya resolusi konflik di Aceh. Sementara laporan yang ditulis oleh BRA adalah untuk mendeskripsikan gambaran akurat mengenai isu kerentanan dan kemajuan program pasca konflik di Aceh, laporan ini juga menyajikan temuan dan rekomendasi untuk memberikan bantuan secara efektif dan mencegah kambuhnya konflik jangka pendek dan menengah di Aceh.

Kritik internal selanjutnya ialah membandingkan skripsi yang ditulis oleh Taupik pada tahun 2005 dengan judul *Resolusi Konflik Aceh : Kajian Ketidakterhasilan Hendry Dunant Centre dalam Penyelesaian Konflik Pemerintah Indonesia dengan GAM 2000-2004* dengan buku *Mediasi Konflik Aceh : Belajar dari Pengalaman HDC di Aceh* yang ditulis oleh Muhammad Sahlan pada tahun 2013, selanjutnya juga dapat dibandingkan dengan Jurnal dari Gabriela Natalia Primi Bagas Gati

dengan judul *Internasionalisasi Kasus Pelanggaran HAM di Aceh Era 1990-2004 oleh Organisasi Internasional*. Ketiga sumber tersebut menjelaskan tentang konflik Aceh yang sudah masuk ke dalam bahasan organisasi Internasional seperti PBB. Konflik yang terjadi di Aceh identik dengan kekerasan, maka dari itu konflik Aceh termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM.

Mengenai tujuan penulisan buku dan karya ilmiah tersebut, menurut pengamatan peneliti tulisan tersebut menjelaskan fakta di lapangan bahwa konflik kekerasan yang ada di Aceh tidak lagi dapat diselesaikan oleh dua pihak yang bersengketa, artinya harus ada pihak yang menjadi penengah. Organisasi Internasional seperti *Henry Dunant Centre* pun berpartisipasi dalam upaya penyelesaian sengketa, namun upaya tersebut belum dikatakan berhasil karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa mengenai penghentian kontak bersenjata di Aceh. Pasca pelanggaran tersebut, utusan-utusan dari HDC yang dikirimkan ke Aceh ditarik kembali dan kesepakatan damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia tidak berjalan sesuai rencana.

Selanjutnya adalah kritik internal dari sumber berupa buku dengan judul *Dokter Zaini Abdullah Pejuang Rakyat Aceh* yang ditulis oleh Murizal Hamzah pada tahun 2009. Buku tersebut merupakan biografi dari salah satu petinggi GAM yaitu Dokter Zaini Abdullah yang sempat menjabat sebagai menteri kesehatan dan menteri luar negeri dalam GAM. Dalam buku tersebut dijelaskan juga mengenai proses-proses yang terjadi di lapangan mengenai kondisi Aceh ketika konflik dan alasan dari pemerintah Indonesia mengenai penanganan konflik Aceh. Awalnya Indonesia tidak mau melakukan upaya dialog sebab selama puluhan tahun kebelakang dan bahkan tidak mengakui keberadaan GAM, hal ini dikarenakan adanya stigma atau labelisasi terhadap GAM adalah Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), Gerombolan Pengacau Liar (GPL), Gerakan Sipil Bersenjata Aceh (GSBA), Gerakan Separatis Aceh (GSA), Gerakan Bersenjata Pengacau Keamanan (GBPK) dan lain-lain. Selanjutnya, Perubahan konstelasi politik pada era kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) alias Gusdur yang mengakui keberadaan GAM (Hamzah, 2016, hlm.45).

Era pemerintahan yang dipimpin oleh Gus Dur merupakan awal dari pelaksanaan dialog damai untuk konflik Aceh. Gusdur meminta *Henry Dunant Centre* (HDC) untuk memfasilitasi dialog RI-GAM yang

dirintis tahun 1999. HDC adalah lembaga internasional independen sebagai fasilitator penangan konflik di berbagai negara (Hamzah, 2016, hlm. 45). Hal ini juga terdapat dalam artikel dari jurnal internasional yang menjelaskan dinamika penyelesaian konflik Aceh dari pihak pemerintah Indonesia, salah satu dinamika yang dihadapi terdapat dalam pernyataan berikut :

*Humanitarian offense felt by the Aceh-nese, that they sometimes become victims of assassination because are presumed to stand for one side, namely GAM or the Government. At the time of President Abdurrahman Wahid (Gusdur) a negotia-tion focusing in Humanitarian Pause con-ducted in 2001, but it stalled. After Gusdurreplaced by the President Megawati Sukarnoputri, the problem-solving deve-lopment in Aceh conflict remained stag-nant. The notable agreement Cessation of Hostility Agreement (COHA) conducted in 2002 from overseas, and it impacted for only several month before it clogged. And unfortunately it followed by military and humanitarian operations by the Indone-sian government in 2003. Armed conflict heats up once again and caused civilian casualties continue to fall. (Zulhilmi & Muzwardi, 2016, hlm. 160-161).*

Pernyataan dari Zulhimi dan Muzwardi juga didukung oleh penjelasan dari Hasanuddin Yusuf Adan (2003, hlm. 32) mengatakan bahwa di Aceh kembang lagi terulang sejarah kekerasan yang tidak pernah pupus. Tragedi ini adalah peniraman 30.000 lebih aparat TNI/POLRI ke Aceh aas nama Operasi terpadu melalui legitimasi hukum keputusan Presiden. Operasi ini sendiri merupakan rangkaian dari kegagalan pertemuan antara RI dan GAM di Tokyo yang menemui kegagalan pada 18 Mei 2003. Dalam konteks ini, RI menawarkan tiga syarat yang harus diterima oleh GAM, diantaranya : *Pertama*, GAM harus menerima otonomi NAD dalam kerangka NKRI. *Kedua*, GAM harus memebrikan komitmen untuk meletakkan senjata dan membubarka Tentara Nanggroe Aceh (TNA) dan berpartisipasi dalam proses politik dari kesepakatan penghentian permusuhan (CoHA). *Ketiga*, GAM harus memberikan komitmen untuk meletakkan senjata, amunisi dan peralatan persenjataan sesuai dengan jadwal dalam CoHA. Tawaran tersebut kemudian tidak diterima oleh utusan GAM, akibatnya malam itu juga RI memberlakukan operasi “pembersihan” terhadap GAM di Aceh. Maka

dari itu, berdasarkan sumber-sumber tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses perdamaian Aceh.

Kritik internal terhadap sumber seperti Jurnal, *Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki* oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2014. *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial Politik di Era Desentralisasi* Oleh Suadi Zainal tahun 2016. Kedua jurnal tersebut menjelaskan kondisi Aceh pasca perjanjian damai dan bagaimana penerapan hasil dari perjanjian damai di Aceh. Pelaksanaan dari hasil perundingan damai Aceh merupakan *win-win solution* bagi kedua pihak dan telah berjalan dengan baik untuk mengakhiri konflik separatis di Aceh berdasarkan beberap sumber literatur, namun menurut Suadi Zainal, MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh karena pelaksanaannya melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas Pemerintah Daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentransformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang.

Kritik internal terhadap sumber karya ilmiah berupa Tesis yang ditulis oleh Henny Lusua dengan judul *Keberhasilan CMI dalam Mediasi Konflik Aceh* pada tahun 2010 menjelaskan mengenai pihak ketiga yang berhasil sebagai fasilitator damai untuk menyelesaikan konflik Aceh. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya musyawarahsebanyak lima kali putaran hingga berujung penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Desember 2005. Sejak saat itulah Pemerintah Indonesia sudah tidak goyah lagi untuk menyelesaikan konflik melalui cara damai yang lebih bermartabat. Kasus-kasus kekerasan pun berangsur-angsur menurun, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pelan-pelan mulai terlihat.

Sementara sumber internet yang dijadikan sumber penelitian juga perlu dilakukan kritik internal. Kritik internal yang dilakukan peneliti untuk menegakkan kredibilitas dari sumber internet ialah dengan membandingkan dengan sumber sejenis yang tentunya sumber tersebut telah dipastikan siapa penulisnya, kapan diterbitkannya, dan instansi mana yang menerbitkan surat kabar tersebut.

### 3.3.3 Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah tidak terlepas dari proses interpretasi, eksplanasi, dan penyajian atau pelaporan sejarah. Dalam

Eka Auliana Pratiwi, 2019

**CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



proses interpretasi sejarah baik disadari ataupun tidak, seorang sejarawan akan menggunakan salah satu aliran atau beberapa aliran filsafat tertentu untuk menafsirkan fakta-fakta yang telah dikumpulkannya. Filsafat sejarah berguna sebagai petunjuk penafsiran sejarah, dan memberikan pemahaman dari penyebab dan keberartian peristiwa sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm. 159).

Proses interpretasi yang dilakukan peneliti menggunakan filsafat deterministik dalam bentuk penafsiran sintesis. Filsafat deterministik, menunjukkan bahwa faktor penentu sejarah tidak hanya pelaku sejarah atau manusia melainkan faktor lain diluar dari manusia juga mampu mempengaruhi peristiwa sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm. 162). Dengan menggunakan penafsiran sintesis, peneliti akan mengkaji peranan CMI dalam penyelesaian konflik Aceh dan dinamika penyelesaiannya dari pihak yang terlibat sengketa. Latar belakang penyelesaian konflik tersebut juga dilihat dari latar belakang yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Maka peneliti, berupaya mencari faktor-faktor lain yang menjadi penggerak peristiwa sejarah.

Agar dapat melihat faktor-faktor lain yang dapat menggerakkan sejarah maka diperlukan kajian interdisipliner atau multidisipliner dalam melakukan penafsiran sejarah. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Gottschalk (1975) mengenai hubungan ilmu sejarah dengan ilmu sosial maupun dengan ilmu humaniora bahwa sejarah sebaiknya tidak dipandang dari satu sisi melainkan dari kedua sisi yaitu sebagai ilmu sosial dan ilmu humaniora.

Sejarawan sebagai ilmuwan sosial dan sejarawan sebagai ilmiawan humaniora, tidak perlu menjadi dua orang yang terpisah; mereka dengan mudah bisa menjadi satu. Dan manfaat daripada yang satu itu kepada baik humaniora maupun ilmu-ilmu sosial akan sangat bertambah jika ia tidak bertindak schizoprenis (Gottschalk, 1975, hlm. 20).

Sementara dalam proses eksplanasi sejarah atau penjelasan sejarah, peneliti menggunakan pendekatan kausalitas. Pendekatan kausalitas merangkaikan berbagai fakta dalam sintesa hubungan kausalitas atau sebab-akibat (Sjamsuddin, 2012, hlm. 197). Dengan menggunakan pendekatan kausalitas, peneliti berusaha mencari sebab apa saja yang latar belakang dipilihnya CMI sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Aceh di Indonesia, bagaimana proses perundingan untuk mencapai kedamaian dan menghasilkan nota kesepahaman antar pihak

yang bersengketa serta hasil dari penerapan perjanjian damai di Aceh dalam rentang tahun 2005-2012.

Selanjutnya dalam menyajikan hasil penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini, akan peneliti tuangkan di dalam BAB IV: PEMBAHASAN, dan dalam pembahasan tersebut peneliti membaginya kedalam 3 bagian utama sesuai dengan fokus masalah yang diajukan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana pengaruh GAM terhadap konflik Aceh ?
2. Apa latar belakang dipilihnya *Crisis Management Initiative* sebagai mediator penyelesaian konflik Aceh ?
3. Bagaimana proses perdamaian yang dilakukan oleh *Crisis Management Initiative* dalam penyelesaian konflik Aceh 2005-2012?
4. Bagaimana dampak dari hasil perundingan damai dalam penyelesaian konflik Aceh terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Aceh 2005-2012?

Struktur organisasi penulisan karya ilmiah berupa skripsi yang sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 6449/UN40/HK/2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya ilmiah UPI tahun 2017 ialah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi, rumusan masalah yang dirinci dalam beberapa poin sebagai pertanyaan penelitian dan disertai juga dengan tujuan penelitian dan penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teoritis, pada bab ini penulis menjelaskan konsep-konsep atau teori-teori yang menunjang dalam proses penhkJajian terhadap permasalahan yang diambil. Selanjutnya juga akan dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dan menyajikan daftar literatur yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penulisan skripsi. Konsep-konsep dan teori yang relevan dan sesuai dengan pembahasan karya ilmiah agar lebih mudah memahami pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, diantaranya berupa metode penulisan dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas

Pendidikan Indonesia tahun 2016 agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan formal penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah juga dijabarkan dalam bab ini, metode penelitian yang dijelaskan meliputi tahapan-tahapan penelitian yang dimulai dari persiapan hingga penyelesaian penelitian dan dijelaskan secara rinci, hal ini akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian agar lebih terstruktur dan sistematis.

Bab IV Peranan *Crisis Management Initiative* dalam Penyelesaian Konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia 2005-2012. Dalam bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat. Selain itu juga akan menjelaskan data-data yang sudah dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang sebelumnya sudah melewati tahapan kritik dan verifikasi terlebih dahulu. Data-data yang sudah didapatkan kemudian dijelaskan dalam bentuk tulisan yang baik dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini merupakan bab terakhir dari karya tulis ini yang berisi inti sari dari tulisan berupa gambaran-gambaran umum yang menjelaskan hasil penelitian dari awal hingga akhir sebagai jawaban dari rumusan masalah. Rekomendasi ditujukan untuk menjelaskan manfaat skripsi ini dalam dunia pendidikan.